

**JATUH BANGUN SINGAPURA MEMBANGUN BANGSA: SUATU
PERBANDINGAN**

Chia, Y. (2015). *Education, Culture and the Singapore Developmental State: 'World-Soul' Lost and Regained?* New York: Palgrave Macmillan. Xi + 257 hlm.

Anggi Afriansyah

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: afriansyah.anggi@gmail.com

Diterima: 17-11-2016

Direvisi: 30-11-2016

Disetujui: 11-12-2016

PENDAHULUAN

Buku berjudul *Education, Culture, and the Singapore Developmental State: World Soul and Regained?* karya Yeow Thong Chia, dosen *University of Sidney*, menjadi karya yang patut dibaca bagi siapa saja yang ingin mengetahui perjalanan panjang Singapura dalam membangun identitas kebangsaannya. Buku ini menjadi sangat menarik untuk ditelaah karena menjabarkan strategi Singapura menguatkan identitas kebangsaan melalui beragam kebijakan pendidikan. Pemerintah Singapura melalui kebijakan pendidikannya berupaya untuk menginternalisasi imajinasi ideal tentang identitas warga negara yang seharusnya. Penulis buku mengeksplorasi interkoneksi yang terjadi antara pertukaran kurikulum sejarah, pendidikan kewarganegaraan, dan ilmu sosial dan politik dalam bingkai sejarah kewarganegaraan, studi kurikulum, dan politik pembangunan bangsa. Penulis buku dengan cermat memeriksa semua dokumen yang terkait dengan proses pembuatan kebijakan-kebijakan pendidikan, sistem bahasa, kurikulum, pidato-pidato, dan laporan-laporan partai untuk dapat menemukan pertarungan-pertarungan wacana yang muncul pada periode tertentu dan kemudian menganalisisnya dengan tajam.

Buku ini, seperti dijelaskan oleh Wing On Lee, *Vice President Open University of Hongkong*, dalam pengantarnya menjadi sangat penting karena memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang proses pembangunan pendidikan di Singapura. Pembangunan pendidikan di Singapura menurut Lee (2015) dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase *survival-driven* (1957–1978), fase *efficiency driven* (1979–1996), dan fase *ability-based* (sejak 1997) (MOE, 2008). Fase *survival-driven* difokuskan pada konstruksi konsep warga negara yang baik yang dilakukan

oleh negara. Fase *efficiency-driven* ditandai dengan penekanan pada penghormatan nilai-nilai pribadi, kelompok etnis, dan agama dan pada saat yang sama menyadari nilai-nilai nasional yang ada. Sementara itu, fase *ability-based* menekankan pada pentingnya mempersiapkan warga negara abad ke-21 yang berbasis pada penguatan pengetahuan, ekonomi serta dikombinasikan dengan kemampuan personal dan sosial.

Singapura merupakan negara yang memiliki banyak kisah sukses. Dengan wilayah yang tak begitu luas, Singapura menjadi negara besar dan berpengaruh tidak hanya di kawasan regional, tetapi juga global. Meraih kemerdekaannya tahun 1965, hanya dalam beberapa dekade saja, Singapura melesat menjadi negara maju. Singapura begitu disegani oleh negara-negara lain di dunia. Dalam berbagai indeks yang dirilis oleh lembaga-lembaga dunia, Singapura selalu dalam posisi yang tinggi. Misalnya, dalam data *World Economic Forum* 2016 Singapura berada pada posisi kedua dalam bidang ekonomi. Singapura menempati posisi kedua dalam rentang waktu enam tahun dan memiliki performa yang kuat di bidang ekonomi. Singapura memiliki posisi yang sangat baik pada pilar pendidikan tinggi dan pelatihan dan pilar pasar kerja yang efisien. Singapura juga memiliki institusi publik yang transparan dan sangat efisien, infrastruktur publik yang paling baik dan memiliki kondisi makro ekonomi yang baik (WEF, 2016, 25). Singapura juga menempati posisi terbaik pada perolehan skor PISA, khususnya pada bidang sains. Padahal, ketika baru merdeka mereka menghadapi periode yang pelik. Krisis ekonomi, pemogokan, dan kerusuhan rasial menjadi problem besar yang harus dihadapi negara pada awal-awal kemerdekaannya. Akan tetapi, meskipun berhasil secara ekonomi dan memiliki prestasi yang mengesankan, Singapura ternyata memiliki permasalahan besar dalam mengidentifikasi nilai-nilai inti negaranya. Menguatkan identitas kolektif nasional merupakan tugas besar pemerintah Singapura lima dekade terakhir. Dalam proses tersebut, sistem pendidikan nasional berperan penting dalam menyosialisasikan posisi siswa sebagai *future citizens* (warga masa depan) untuk membantu proses pembangunan negara.

SINGAPURA DAN INDONESIA DALAM NARASI SEJARAH SIGKAT

Singapura merupakan wilayah koloni Inggris mulai dari tahun 1819. Ketika itu Thomas Stamford Raffles dari Kantor dagang *East India Company* menjadikan wilayah Singapura sebagai pos perdagangan perusahaan. Padahal, sebelumnya Singapura hanyalah sebuah desa yang memiliki penduduk kurang dari dua ratus jiwa. Perjanjian tahun 1824 antara Belanda dan

Inggris kemudian memperjelas posisi Singapura sebagai wilayah koloni Inggris. Menurut Edwin Lee, kehidupan ekonomi di Singapura menjadi semakin besar karena adanya perdagangan. Pelabuhan yang ramai kemudian menarik para pedagang dan pencari kerja dari China, India, maupun wilayah-wilayah di sekitar Singapura untuk datang mengadu nasib. Para pendatang tersebut berusaha mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam kajian Furnivall, Singapura ketika itu merupakan masyarakat majemuk (*plural society*). Ada pertemuan dari masyarakat Eropa, China, India, dan masyarakat asli. Mereka memiliki agama, kultur, bahasa, dan pandangan hidup masing-masing. Ruang pertemuan antarbudaya hanya terjadi di pasar ketika proses jual beli karena mereka tinggal terpisah dan bukan merupakan unit politik yang sama. Di bidang ekonomi, pembagian kerja yang ada pada masa itu berdasarkan pertimbangan rasial. Merujuk pada sejarah panjang Singapura, sama halnya dengan wilayah lain yang berada di bawah pemerintah kolonial, negeri ini sangat bergantung pada kemurahan pemerintah kolonial. Pada masa itu kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah kolonial. Ketika itu, Singapura hanya dianggap sebagai koloni perdagangan sehingga pemerintah kolonial tidak memiliki kepentingan membangun Singapura sebagai suatu negara bangsa secara utuh. Di bidang pendidikan, ada empat sistem persekolahan yang terpisah dan memiliki aturan masing-masing, yaitu Inggris, Melayu, Tamil, dan Cina. Masing-masing ras memiliki sistem dan mekanisme persekolahan yang berbeda.

Sekolah Melayu mendapat dukungan dari pemerintah karena kepentingan pemerintah kolonial terhadap lulusan sekolah tersebut. Merujuk pada laporan tahun 1884 di bidang pendidikan, diberikannya dukungan kepada sekolah melayu ditujukan agar lulusan dari sekolah tersebut berguna bagi stabilitas pemerintahan kolonial. Minimal setelah mendapatkan pendidikan di sekolah para penduduk tersebut mampu menyesuaikan diri dengan aturan pemerintah kolonial. Hal tersebut tentu saja demi kebutuhan pemerintah kolonial Inggris dalam mempertahankan stabilitas sosial di masyarakat. Dalam pandangan pemerintah kolonial, masyarakat Melayu ideal adalah mereka yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik dan patuh pada aturan kolonial. Pemerintah kolonial sendiri pada awalnya berkeberatan untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris di Sekolah Melayu karena tiga hal: biaya yang mahal, sulitnya mendapatkan guru yang sesuai dengan kualifikasi, dan adanya keengganan siswa yang sudah menguasai bahasa Inggris untuk menjadi pekerja (buruh). Menurut Bokhorst-Heng, pada akhirnya kesempatan untuk mempelajari bahasa Inggris bagi masyarakat secara lebih terbuka (meskipun tetap terbatas)

karena kebutuhan pemerintah kolonial Inggris terhadap tenaga administrasi yang memiliki pemahaman bahasa Inggris yang baik. Pendidikan berbahasa Inggris penting agar para siswa mengerti dan memahami bahasa Inggris secara baik dan pada akhirnya menjadikan mereka para pekerja yang dapat tunduk dan patuh pada setiap aturan pemerintah. Pemerintah kolonial memang membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola administratif pemerintahan. Singapura kemudian lepas dari cengkraman kolonialisme Inggris pada tahun 1955, lepas dari bagian Malaysia pada tahun 1963, dan merdeka pada tahun 1965.

Kondisi yang terjadi di Singapura ketika di bawah naungan pemerintah kolonial Inggris tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Hindia Belanda di bawah pemerintah kolonial Belanda. Seperti yang terjadi di Singapura, kepentingan ekonomi dan keinginan untuk mempertahankan perbedaan status merupakan beberapa alasan di balik ketidaktertarikan pemerintah kolonial terhadap persoalan pendidikan kaum pribumi. Pada tahap awal, yang menjadi konsentrasi pemerintah kolonial saat itu adalah akumulasi modal (Latif, 2005, 86).

Pada masa penjajahan, tidak semua penduduk mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Hanya mereka yang berasal dari kalangan priyayi yang memperoleh kesempatan mengakses pendidikan. Pendidikan pada masa itu memang tidak memihak rakyat kebanyakan. Mereka yang miskin tidak mungkin mendapat pendidikan. Pendidikan hanya diberikan kepada elit bangsawan untuk menjadikan mereka pengelola administratif pemerintah yang taat dan patuh pada aturan. Meskipun begitu, pada akhirnya kalangan menengah yang didik oleh sistem kolonial tak semuanya patuh pada aturan tersebut. Pendidikan kolonial tersebut juga kemudian melahirkan intelektual yang memberontak kepada sistem kolonial. Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka juga para *founding fathers* dan *mothers* lainnya merupakan produk pendidikan kolonial, namun kemudian menentang sistem kolonial secara berani. Dhakidae (2003, 97) menuliskan bahwa seluruh sistem pendidikan kolonial memungkinkan lahirnya kelas menengah yang diisi kaum cendekiawan dalam segala bidang. Institusi yang didirikan untuk melanggengkan sistem kolonial. Sekolah-sekolah yang tidak didirikan pemerintah kolonial, seperti sekolah-sekolah nasionalis atau sekolah kaum pergerakan, dianggap sebagai sekolah liar (*wilde scholen*). Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap pendidikan kolonial yang hanya memperbolehkan elit priyayi bersekolah. Soekarno sangat mengkritik sistem pendidikan kolonial yang ada pada masa itu. Menurutnya, kurikulum

pendidikan ketika itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam pemerintah jajahan. Ilmu yang dipelajari merupakan ilmu untuk kepentingan kaum kapitalis. Ia kemudian menjelaskan bahwa ilmu irigasi yang dipelajari bukan sistem pengairan sawah tetapi sistem pengairan untuk perkebunan tebu dan tembakau yang memang saat itu menjadi prioritas pemerintah kolonial. Menurut Soekarno, irigasi hanya untuk kepentingan imperialisme dan kapitalisme, bukan untuk memberi makan rakyat yang kelaparan, tetapi hanya untuk membuat makmur pemilik kebun (Adams, 2007, 80).

Dhakidae (2003, 97) mengungkap bahwa penggunaan bahasa Belanda maupun pengajarannya hanya diberikan bagi kaum elit bangsawan. bahasa Belanda tidak ditujukan untuk kalangan miskin. Pengajaran bahasa Belanda tidak diberikan kepada masyarakat karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan protes terhadap pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial khawatir adanya pengajaran Bahasa Belanda hanya akan melahirkan kelas proletar yang terdiri dari kaum “intelektual setengah matang” terlantar, yang tidak puas dan mudah terpancing mengikuti gerakan anti-Belanda. Pemerintah pun memunculkan wacana bahwa masyarakat harus dihindarkan dan dilindungi dari segala jenis “obat palsu di bidang pendidikan” (*kwakzalverij op onderwijsgebied*). Titik balik dalam sikap pemerintah kolonial terhadap urusan pendidikan kaum pribumi di Hindia baru berlangsung pada paruh kedua abad ke 19. Kondisi tersebut terjadi karena pengaruh politik kaum liberal dalam persoalan-persoalan tanah jajahan. Untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi kaum liberal di negeri jajahan, perluasan birokrasi pemerintahan merupakan sesuatu yang harus diupayakan. Kantor pemerintahan sipil, baik untuk Orang Eropa maupun untuk kaum pribumi, memerlukan para pekerja yang terampil (Latif, 2005, 89).

Pemerintah kolonial kemudian memberlakukan politik etis yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Dari ketiga program tersebut, pendidikan dianggap sebagai yang paling penting (Latif, 2012, 283). Kebijakan politik etis tersebut kemudian membuat pemerintah kolonial Belanda membangun beragam sekolah seperti *Europeeische Lagere School*, sekolah desa (*de desashschool*) pada tahun 1907, *Hollandsch-Chineesche School* pada tahun 1908, *Hollandsch-Inlandsche School* (1914) dan *Vervolgschool* (1914). Pada tahun 1915 kemudian dibentuk komisi untuk membentuk sekolah menengah khusus untuk pendidikan bumi putra, yang kemudian diberi nama *Algemeene Middelbare School* (Dhakidae, 2003, 97).

PROMOSI NILAI-NILAI MELALUI PENDIDIKAN

Dalam dekade awal kemerdekaannya Singapura memiliki perhatian besar terhadap daya tahan mereka sebagai negara yang baru merdeka. Singapura kemudian mempercepat proses industrialisasi dan mempromosikan kohesi sosial melalui *platform* multirasialis. Dari proses tersebut, Singapura berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikannya sebagai salah satu dari Empat Naga Kecil Asia (*Four Little Asian Dragons*). Periode 1965 sampai dengan 1980 oleh beberapa pemimpin di Singapura dianggap sebagai era keemasan (*golden age*). Dalam perjalanannya, pada tahun 1980 sampai 1990 terminologi *Asian Values* menjadi wacana yang sangat populer dalam diskursus politik di Singapura, yang dipelopori oleh dua orang politisi terkemuka, yaitu Lee Kuan Yew dari Singapura dan juga Mahathir Mohammed dari Malaysia. Referensi awal untuk *Asian Values* adalah seminar yang diselenggarakan *University of Singapore* pada 15 November 1975 yang bertajuk “*Asian Values and Modernisation*”. Dari seminar tersebut ada beberapa definisi mengenai *Asian Values*, yaitu a) kuatnya solidaritas kelompok dan hubungan paternalistik; b) gotong royong dan kehidupan komunitas; dan c) sistem kekeluargaan.

Pada masa itu, timbul kekhawatiran dari Lee Kuan Yew pada nilai-nilai barat yang dianggap bertentangan dan akan merusak nilai ketimuran. Pemerintah ketika itu khawatir karena jika dibiarkan, lama-kelamaan akar budaya Singapura akan terus tergerus oleh pengaruh dari nilai-nilai barat.

Pemerintah Singapura khawatir anak-anak muda akan terbawa nilai-nilai budaya barat yang dianggap merusak dan individualis. Pemerintah kemudian menggagas internalisasi *Asian Values* melalui Pendidikan Moral, Pendidikan Agama, dan Studi Sejarah serta Ilmu Sosial. Pemerintah menggunakan juga mata pelajaran *Religious Knowledge* (RK) sebagai program pendidikan moral dan kewarganegaraan. Dalam pendidikan moral terdapat materi mengenai pengembangan kepribadian secara personal, tanggung jawab sosial, dan loyalitas terhadap negara. Materi dalam pendidikan moral dimulai dari penguatan pribadi siswa, tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan loyalitas pada negara. Nilai-nilai tersebut banyak merujuk pada pandangan filsafat konfusian dan dimaksudkan agar siswa mampu mengenai menggali potensi diri, mengelola keluarga, mengurus negara, dan damai di surga.

Nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasi pada berbagai jenjang pendidikan. Pada level pendidikan dasar yang paling penting adalah penguatan perilaku yang baik dan membangun karakter agar mereka dapat hidup dengan baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Pada level sekolah menengah difokuskan pada tanggung jawab pada masyarakat dan negara. Selain itu, juga dikuatkan pemahaman mengenai budaya lokal untuk menangkal serangan globalisasi. Kohesi sosial dipromosikan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan sejarah. Sejak tahun 1968 terdapat komite khusus yang kemudian menyusun silabus pendidikan kewarganegaraan yang kemudian dikenalkan di pendidikan dasar dan menengah. Patriotisme, loyalitas, dan kesadaran kewargaan ditanamkan sebagai nilai-nilai kunci (Jason, 1997, 306).

Negara berupaya untuk menginternalisasi dan mengartikulasikan identitas kesingapuraan melalui mata pelajaran tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah menggabungkan nilai-nilai Asia dan nilai-nilai konfusianisme dalam sebagai bagian dari proyek pembangunan manusia Singapura. Meskipun begitu, pada akhirnya nilai-nilai Asia tersebut banyak dikritik karena dianggap sebagai alat untuk meningkatkan legitimasi dan hegemoni pemerintah, khususnya bagi *People's Action Party* (PAP). Hegemoni ini secara sadar dilakukan oleh partai yang berkuasa agar nilai-nilai yang dianutnya kemudian disetujui oleh seluruh kelompok masyarakat. Pendidikan digunakan sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan kelompok berkuasa. Gramsci percaya bahwa mereka yang ada di kelas kontrol itu hegemonik, yang bukan hanya mengontrol harta benda dan kekuasaan, tetapi juga ideologi masyarakat. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh pihak yang berkuasa. Pendidikan adalah alat yang efektif untuk menghegemoni cara pandang masyarakat (Adamson: 1983, 141).

Program pendidikan nasional merupakan inisiatif dari PAP untuk menggunakan sistem persekolahan sebagai instrumen sosialisasi politik dan pembangunan bangsa. Selain bertujuan untuk pembangunan nasional, pendidikan nasional juga bertujuan untuk menyiapkan siswa dengan kemampuan yang sesuai dengan industrialisasi dan Singapura yang modern pada masa depan.

Setelah gagal dengan internalisasi *Asian Values*, pemerintah kemudian berusaha mempromosikan *shared values* (nilai bersama) yang menjadi pegangan bersama. Setelah serangkaian diskusi dan perdebatan panjang, lahirlah lima nilai bersama yaitu (1) *nation before community and society above self*, (2) *family as the basic unit of society*, (3) *community support*

and respect for the individual, (4) consensus not conflict, (5) racial and religious harmony. Nilai-nilai itu kemudian diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan, ilmu-ilmu sosial, dan sejarah.

Melalui pendidikan nasional, negara bermaksud melanggengkan stabilitasnya. Fokus pendidikan kewarganegaraan menekankan pada pembentukan pemerintahan yang baik dan pembangunan bangsa dan lebih sedikit pada penekanan proses demokrasi yang baik. Pemerintah menyatakan pendidikan nasional sukses ketika masyarakat tidak hanya berhasil pada penguatan intelektualitasnya saja, tetapi ketika komitmen masyarakat dan juga ikatan emosional masyarakat kepada Singapura menjadi semakin kuat. Program pendidikan nasional yang dibuat selalu bersifat *top down*. Pendidikan nasional menjadi salah satu dari tiga program prioritas yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1997. Pendidikan Nasional diimplementasikan pada pendidikan formal dan menjadi alat sosialisasi yang penting bagi negara untuk menyemaikan ide-ide tentang pentingnya keharmonisan dan keselarasan masyarakat Singapura, mempromosikan kesepahaman dalam relasi antaretnik, dan proteksi dari ide-ide yang dianggap berbahaya dan mengancam kelangsungan Singapura. Pada saat yang sama pihak keamanan Singapura juga begitu ketat dalam menjaga keamanan nasional dari gerakan-gerakan yang dianggap membahayakan stabilitas nasional. Dengan demikian, kebebasan berpolitik dan berkespresi yang memang sudah sangat terbatas semakin lebih dibatasi.

Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan promosi agar para siswa mampu berpikir kritis dan terbuka yang diekspos dalam visi *Thinking Schools Learning Nation* (TSLN) serta keterbukaan politik yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Goh Chok Tong dan Wakil Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Semuanya menjadi retorika semu karena di level praktik, anak-anak dididik untuk selalu tunduk dan patuh pada otoritas negara. Ruang kritisme tidak dibuka dalam kegiatan politik di Singapura karena keamanan dan kebertahanan Singapura adalah prioritas utama dan pendidikan menjadi kunci penting dalam proyek besar ini.

Indonesia pada era Orde Baru juga menggunakan pendidikan sebagai instrumen kunci dalam menyebarkan gagasannya. Basis kekeluargaan seperti yang dijabarkan dalam *Asian Values* juga menjadi wacana yang ditonjolkan pada era Orde Baru. Untuk melengkapi konsep negara kekeluargaan dan menciptakan kepatuhan masyarakat pada negara, Orde Baru memperkenalkan juga konsep triologi pembangunan, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) stabilitas politik, dan (3) pemerataan. Indonesia yang saat itu dalam kondisi terpuruk harus

segera bangkit. Prioritas pada pertumbuhan ekonomi kemudian disambut hangat oleh masyarakat karena dianggap akan mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang sangat parah ketika itu. Kondisi tersebut dapat tercapai jika negara dalam kondisi yang stabil dan tanpa konflik (Budiman, 2006, 21). Dhakidae (2003, 688) menjelaskan bahwa pada era Orde Baru untuk mendukung kebangsaan sebagai kesatuan, maka pendidikan bukan menjadi prioritas pemerintah. Prioritas Orde Baru ketika itu adalah keamanan, ketahanan nasional, dan kesatuan sehingga ketika itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pun merasa berkepentingan dalam pendidikan nasional. L.B. Moerdani dalam Dhakidae (2003, 688) menjelaskan bahwa sasaran pendidikan nasional hendaknya ditujukan untuk meninggikan segenap unsur bangsa menjadi sama tingkat dan kualitasnya. Pendidikan nasional akan dapat memberikan warna pada bobot efektif ketahanan nasional. Di dalam sasaran pendidikan nasional, pimpinan ABRI ingin menggarisbawahi bahwa secara makro harus selalu diusahakan agar kepentingan kesejahteraan dan kepentingan keamanan diintegrasikan pemikirannya dan dikoordinasikan pelaksanaan programnya. Itu artinya ruang kritisme terhadap negara ditutup. Warga negara harus selalu patuh dan tunduk terhadap apa yang negara inginkan. Negara memosisikan diri sebagai pihak yang punya otoritas penuh dalam menentukan arah perjalanan bangsa.

Pendidikan dalam pandangan Tilaar (2012) merupakan hak dan kewajiban negara dalam rangka melestarikan kekuasaannya. Oleh karena itu, pendidikan cenderung dikuasai oleh negara. Tirtosudarmo (2007:310) menjelaskan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada era Orde Baru menempatkan individu atau penduduk sebagai pusat dari berbagai program investasi yang ada. Menurut Tirtosudarmo, hal tersebut tidak bertentangan dengan teori modernisasi yang mementingkan adanya keteraturan dan kepatuhan dari “penduduk” dan “masyarakat” untuk mengikuti dan menjalankan segala sesuatu yang sudah direncanakan pemerintah pusat. Pada era Orde Baru, seperti yang dipaparkan oleh Ali (2009,16), pendidikan dikontrol ketat oleh pemerintah sehingga tidak membuka ruang diskusi publik maupun kreativitas. Pembangunan pendidikan diarahkan hanya untuk pembangunan ekonomi semata, yang merujuk pada Repelita II, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan. Pendidikan pada era Orde Baru lebih terintegrasi dengan (diinstrumentasi untuk memecahkan) masalah makro, seperti pembangunan ekonomi, masalah kependudukan dan struktural sosiologis (Sukarno, 2008, 114).

Selain itu, seperti yang dilakukan Singapura untuk menginternalisasi *shared values* pemerintah era Orde baru juga berupaya menguatkan pemahaman mengenai dasar negara Pancasila melalui beragam program. Di Indonesia ada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila yang isinya memang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Pancasila. Melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pancasila diinternalisasi kepada beragam elemen masyarakat. Pemerintah adalah satu-satunya yang memiliki otoritas dalam menafsirkan Pancasila.

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standarisasi karakter warga negara. Standarisasi itu mencerminkan *civic virtues* (kebajikan-kebajikan warga negara) yang disalurkan dalam mata pelajaran PMP dan atau PPKn dengan memasukkan secara membabi buta tafsir Pancasila menurut P4. *Civic virtues* itu masing-masing direduksi dari tafsir Pancasila menjadi 36 butir pengamalan nilai-nilai Pancasila. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara (Samsuri, 2004, 226).

PENUTUP

Berbagai pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi kunci penting dalam narasi pembangunan negara Singapura. Pemerintah memiliki fokus dalam membangun masyarakat melalui pendidikan. Kesadaran pemerintah Singapura mengkonstruksi identitas masyarakat Singapura terlihat dari beragam program yang ada dalam kebijakan pendidikannya. Propaganda pemerintah dalam menampilkan wacana dominan yang harus muncul dalam kesadaran masyarakat begitu kental diinternalisasi melalui pendidikan. Dokumen pendidikan baik itu aturan di tingkat nasional sampai silabus kurikulum di tingkat sekolah, menunjukkan kuatnya hegemoni negara dalam mengatur cara pandang warganya.

Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah adanya kemiripan antara proyek besar pendidikan Singapura dengan Indonesia, khususnya pada periode Orde Baru. Pada periode Orde Baru pemerintah begitu kuat dalam menyebarluaskan kebijakan pendidikan yang merujuk pada tafsiran negara mengenai manusia seperti apa yang dibutuhkan dalam pembangunan, yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Pada era tersebut pendidikan memang difokuskan pada pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk memasuki pasar kerja. Narasi stabilitas

politik untuk ketenangan membangun Singapura juga menjadi hal yang sama dengan kondisi Indonesia ketika Orde Baru.

Keistimewaan pada buku ini adalah kemampuan penulis dalam menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan sejarah panjang Singapura dalam membangun pendidikan. Penulis buku ini berhasil memberikan babakan sejarah pada tiap zaman dan menganalisisnya dengan cermat sehingga buku ini tidak terjebak pada teks sejarah normatif semata. Penulis buku ini pun tidak segan-segan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah Singapura di setiap rezim. Jatuh bangun Singapura dalam membangun identitas kolektif dan menjadikannya sebagai negara yang disegani saat ini disajikan secara lengkap. Singapura yang terlihat sempurna ternyata juga memiliki beragam permasalahan yang kompleks. Buku ini patut dibaca oleh mahasiswa, guru, dosen, peneliti maupun masyarakat umum yang berminat terhadap isu-isu pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

- Ali, Muhammad. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Grasindo.
- Adams, Cindy. (2007). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Bung Karno.
- Adamson, Walter L. (1983). *Hegemony and Revolution: A Study of Antony Gramsci's Political and Cultural Theory*. Los Angeles: University of California Press.
- Budiman, Arief. (2006). *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Alvabet-Freedom Institute.
- Dhakidae, Daniel. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Yudi. (2005). *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke 20*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Latif, Yudi. (2012). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar" Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Citra.
- Tirtosudarmo, Riwanto. (2007). *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LIPI Press-Yayasan Obor Indonesia.

World Economic Forum. (2016). *The Global Competitiveness Report 2016-2017*. Geneva: World Economic Forum.

Jurnal

Sukarno, Makmuri. (2008). "Perguruan Taman Siswa: Kasus Pendidikan Berbasis Masyarakat Menghadapi Negara", *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Jilid XXXIV, No. 2, 2008.

Samsuri. (2004). "Civic Virtues dalam Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan di Indonesia Era Orde Baru", *Jurnal Civics*, vol I, No. 2, 2004.

Tan, Jason. (1997). "Education and Colonial Transition in Singapore and Hong Kong: Comparisons and Contrasts Jason Tan Source", *Comparative Education*, Vol. 33, No. 2, Taylor & Francis, Ltd. Stable